

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan UKT sebagai harga pertukaran antara mahasiswa dan universitas PTN-BH, khususnya di Universitas X. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Mahasiswa memaknai UKT secara beragam sesuai dengan latar belakang sosial-ekonomi, jalur masuk, serta pengalaman akademik yang dimiliki. Sebagian mahasiswa memaknai UKT sebagai beban ekonomi yang menimbulkan tekanan finansial dan psikologis, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi atau yang menilai penetapan golongan UKT belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Di sisi lain, sebagian mahasiswa memaknai UKT sebagai bentuk investasi pendidikan yang dipandang sebanding dengan manfaat akademik, fasilitas pendidikan, serta peluang karier yang diperoleh melalui pendidikan tinggi. Perbedaan pemaknaan tersebut turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan mahasiswa, seperti pengelolaan keuangan, perilaku akademik, dan kehidupan sosial. UKT dimaknai sebagai harga pertukaran melalui penilaian mahasiswa terhadap kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan layanan pendidikan yang diterima dari universitas.
2. Birokrasi universitas memaknai UKT dalam dua dimensi yang saling berkaitan. Dalam dimensi institusional, UKT dipahami sebagai salah satu sumber penerimaan utama yang mendukung keberlanjutan operasional universitas, terutama dalam kondisi keterbatasan pengembangan sumber pendanaan alternatif, khususnya bagi universitas yang berada di luar kawasan industri. Dalam dimensi konseptual pada kerangka PTN-BH, UKT dipahami sebagai harga pertukaran atas layanan pendidikan yang disediakan institusi. Namun, konsep tersebut berhadapan dengan ekspektasi masyarakat yang masih memandang pendidikan tinggi negeri sebagai layanan publik yang harus tetap

terjangkau. Akibatnya, universitas dituntut menyeimbangkan kebutuhan pendanaan untuk meningkatkan kualitas layanan dengan keterbatasan regulasi dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan UKT sebagai bagian dari upaya mempertahankan legitimasi institusi.

3. Perbedaan pemaknaan antara mahasiswa dan birokrasi universitas membentuk relasi sosial-ekonomi yang didasarkan pada pertukaran antara pembayaran UKT dan penyediaan layanan pendidikan. Relasi tersebut menghasilkan ekspektasi yang berbeda terhadap kebijakan UKT, di mana mahasiswa menilai hubungan dengan universitas berdasarkan kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan layanan yang diterima, sedangkan universitas berupaya menyeimbangkan tuntutan peningkatan kualitas layanan dengan keterbatasan pendanaan yang dimiliki. Perbedaan ekspektasi tersebut memengaruhi legitimasi kebijakan UKT, sehingga legitimasi tidak hanya ditentukan oleh keabsahan regulasi, tetapi juga oleh persepsi mengenai keadilan, transparansi, kualitas layanan, dan responsivitas universitas. Dalam konteks PTN-BH, kondisi ini menunjukkan bahwa pemaknaan UKT sebagai harga pertukaran menghadirkan dilema bagi universitas untuk menjaga keberlanjutan pendanaan tanpa mengurangi penerimaan masyarakat yang masih memandang pendidikan tinggi sebagai layanan publik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak yang terkait.

Bagi Universitas X, perlu dilakukan penguatan mekanisme verifikasi data ekonomi mahasiswa dalam proses penetapan golongan UKT agar pengelompokan yang dihasilkan lebih akurat dan berkeadilan. Selain itu, universitas perlu meningkatkan transparansi pengelolaan dana UKT kepada mahasiswa melalui publikasi laporan alokasi penggunaan dana secara berkala dan mudah diakses. Kebijakan keringanan UKT juga perlu diperluas cakupannya agar dapat menjangkau mahasiswa dari jalur reguler maupun mandiri yang menghadapi kesulitan ekonomi. Responsivitas universitas terhadap keluhan mahasiswa perlu ditingkatkan, tidak hanya dalam hal keterbukaan menerima aspirasi, tetapi juga

dalam mengoptimalkan mekanisme penyampaian dan tindak lanjut aspirasi mahasiswa secara tepat waktu.

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu institusi PTN-BH sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi pada konteks yang berbeda. Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan beberapa PTN-BH yang memiliki karakteristik berbeda, baik dari segi lokasi geografis, skala institusi, maupun kondisi sosial-ekonomi mahasiswanya. Penelitian dengan pendekatan komparatif juga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai variasi pemaknaan UKT di berbagai konteks institusional. Selain itu, penelitian dengan pendekatan kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur secara lebih terukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kesesuaian UKT dengan layanan yang diterima, serta hubungan antara transparansi kebijakan dengan tingkat legitimasi institusi.

